

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kependudukan adalah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, bukan hanya negara berkembang akan tetapi juga dihadapi oleh negara maju sekalipun. Pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkat mengakibatkan permasalahan penduduk menjadi salah satu urgensi permasalahan yang saat ini dihadapi. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membuat resiko angka kemiskinan semakin tinggi, laju pertumbuhan penduduk yang tidak dapat terkendali membuat permasalahan baru dalam suaru negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat pesat, negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia membuat Indonesia menjadi negara yang tidak seimbang antara jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Irianto, 2015) menyebutnya dengan istilah “Pembangunan berwawasan kependudukan”, artinya dalam proses pembangunan semua pihak harus diarahkan bagaimana menjadikan penduduk sebagai pelaku pembangunan, produsen, dan sekaligus pasar yang potensial. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun senantiasa mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk ini cenderung akan mengakibatkan juga pertumbuhan angkatan kerja. Menurut (Bonneri, 2018) Angkatan kerja terdiri atas golongan yang berkerja dan golongan yang menganggur yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih sekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau menerima pendapatan. Permasalahan yang dihadapi dengan bertambahnya angkatan kerja adalah bertambahnya pengangguran karena tidak didukung oleh kesempatan kerja yang tersedia.

Permasalahan yang terjadi tentunya menuntut pemerintah untuk menanggapi serius permasalahan ini. Indonesia memiliki ratusan ragam suku dan budaya, meskipun demikian persebaran penduduk yang tidak merata menjadi salah satu kegagalan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Populasi penduduk yang lebih dari 250 juta merupakan

sebuah ketidakmerataan persebaran, Suku Jawa menyumbang sekitar 45% populasi penduduk di Indonesia, belum lagi suku sunda yang berjumlah 15% dari penduduk. Jika ditotalkan sebanyak 60% populasi penduduk di Indonesia berdiam di pulau jawa. Persebaran penduduk Indonesia masih terlalu padat di wilayah barat, sehingga banyak pulau besar yang harusnya disana terdapat penduduk yang bisa ditampung lebih besar dari saat ini, misalkan Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Akan tetapi, diantara dua pulau ini masih sedikit sekali persebaran penduduk disana.

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang memiliki permasalahan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Persebaran maupun laju pertumbuhan penduduk di provinsi NTB merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum juga dapat diselesaikan oleh Pemerintah NTB. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB tahun 2018 jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat sebanyak 5.013.687 dengan persebaran Pulau Lombok sebanyak 3.512.689 orang dan Pulau Sumbawa 1.500.998 orang. Luas wilayah pulau Lombok 5.435 km² dan Pulau Sumbawa 15.426,20 km². Pulau Lombok dengan wilayah yang lebih kecil didiami oleh 2/3 dari populasi penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat, permasalahan inilah yang perlu di selesaikan oleh pemerintah provinsi NTB. Padahal, dengan kekayaan alam Pulau Sumbawa yang begitu banyak dan wilayah yang begitu luas sangat berpotensi untuk memberikan kehidupan baru bagi masyarakat yang sudah terlalu banyak di Pulau Lombok. Angka kemiskinan yang semakin meningkat, lapangan pekerjaan yang semakin berkurang membuat permasalahan kependudukan menjadi masalah yang sangat urgen di Provinsi NTB. Persebaran penduduk yang terlalu padat di Pulau Lombok menimbulkan masalah baru, masalah lingkungan, kejahatan yang semakin meningkat, ruang terbuka hijau yang berkurang, pengangguran dan masalah lainnya.

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB pada Maret 2020 angka kemiskinan di provinsi NTB sebanyak 713,89 ribu orang (13,97%) naik (0,09%) dibandingkan pada periode September 2019 sebanyak 705,68 ribu orang. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 368,43 ribu orang atau 14,90 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 345,45 ribu orang atau 13,09 persen. Banyaknya masyarakat pedesaan yang berpindah ke kota tidak berjalan lurus dengan tersedianya banyak lapangan pekerjaan sehingga angka kemiskinan masyarakat perkotaan semakin tinggi, sedangkan

semakin berkurangnya lahan pertanian yang ada di desa membuat berkurangnya lahan bagi masyarakat pedesaan.

Menurut (Yulianto, 2021) Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu tentang keluarga berencana. Kebijakan ini dilakukan pada tahun 2019 sehingga Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah beberapa kampung rintisan yang menjadi awal dari program ini di libatkan untuk menyelenggarakan kebijakan pemerintah Nusa Tenggara Barat. Implementasi kebijakan program kampung keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan program ini belum mencapai tingkat keefektifan. Dalam pengimplementasiannya masih belum efektifnya program ini mengakibatkan kebijakan pemerintah tentang menekan laju pertumbuhan penduduk belum berhasil sepenuhnya. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari dinas terkait membuat program ini tidak berjalan lancar, sehingga hanya pada awal kebijakan saja program ini berjalan, setelah itu karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi lebih lanjut mengakibatkan program ini gagal. Kedepannya, diharapkan ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan tentang laju pertumbuhan penduduk, pemerintah lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap kampung rintisan keluarga berencana, sehingga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program tersebut. Sehingga setelah program itu berhasil pemerintah dapat melaksanakan programnya ke wilayah yang lebih luas lagi, bukan hanya kampung namun akan beranjak dari tingkat Desa kemudian Kecamatan hingga ke Tingkat Kabupaten.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian diatas maka yang menjadi fokus penelitian penulis adalah

Bagaimana implementasi program pengembangan kampung keluarga berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan Pergub Nomor 6 Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah : Mengetahui bagaimana pengimplementasian program pengembangan kampung keluarga berencana yang

dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Pergub nomor 6 Tahun 2019

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis :

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah kasanah keilmuan dan dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk mengulas lebih dalam apa saja kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk.

1.4.2 Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau kontribusi bagi Pemerintah daerah terkait dengan pembuatan kebijakan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penduduk merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatu Ainy mengenai *Hubungan antara Fertilitas, Moralitas, Dan Migrasi Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk* mengkaji tentang bagaimana pertumbuhan yang pesat tanpa disertai kualitas yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan nasional. Hubungan fertilitas dengan laju pertumbuhan penduduk sangatlah signifikan, perubahan keadaan penduduk dipengaruhi oleh tingkat kematian dan kelahiran. Nilai korelasi fertilitas dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,67 (Ainy et al., 2019)

Tingginya pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangya struktur umur penduduk di beberapa daerah menjadi masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana dalam tingkat pertumbuhan (Abdurrahman et al., 2019) mengkaji mengenai *Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram*. Secara umum penelitian ini membahas tentang kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Mataram dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kota Mataram dalam memberikan lapangan pekerjaan dan cara menekan laju pertumbuhan penduduk, yang salah satunya ialah dengan membuat kampung Keluarga Berencana (KB).

Penelitian serupa yang relevan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Desy Lestari mengenai *Penerapan metode eksponensial pada proyeksi laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara*. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan penelitian di Sumatera Utara. Tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat dapat dikendalikan dengan cara menghitung presentase pertumbuhan setiap tahun dengan metode eksponensial sehingga menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang terkait dengan laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah harus memperhatikan lagi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk yang terjadi di Sumatera Utara sehingga pemerataan penyebaran penduduk dapat terjadi dengan melakukan transmigrasi dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi terciptanya kesejahteraan rakyat (Lestary, 2019)

Penelitian serupa oleh Ranthy Pancasasti & Enis Kherunnisa dalam *Analisis Dampak Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Aspek Kependudukan Berwawasan Gender Pada Urban Area Di Kota Serang* mengkaji tentang aspek kependudukan berwawasan gender pada urban area kota Serang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahunnya akan menyebabkan permasalahan yang membuat ketimpangan dan dampak sosial bagi masyarakat. Sehingga solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini ialah merencanakan pernikahan pada usia ideal dan merencanakan kehamilan sehingga dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Tingginya angka kelahiran ini turut didorong oleh pandangan masyarakat yang menganggap bahwa banyak anak banyak rezki (Pancasasti & Khaerunisa, 2018)

Pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah kependudukan dan pembuat kebijakan meningkatkan dan memperhatikan kerjasama agar masalah kependudukan dapat terselesaikan. M. Hade Ramadan & Zahratul Idami dalam penelitiannya di Kota Banda Aceh *Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh* menemukan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh yang dinamakan kebijakan KKBPK oleh Dinas P3AP2KB yang mana tujuannya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan salah satu programnya yaitu Keluarga berencana, namun beberapa hambatan tetap dialami oleh pemerintah Kota Banda Aceh sehingga dalam

pelaksanaannya masih belum efektif. Pelaksanaan Program KKBPB belum berjalan baik, sehingga perlu adanya evaluasi mengenai kebijakan ini (Ramadhan & Idami, 2020)

Salah satu dampak dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali adalah kemacetan lalu lintas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arga Satria Sandi yang dilakukan di Kota Semarang mengkaji tentang *DAMPAK PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP INFRASTRUKTUR DI KOTA SEMARANG*. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat membuat kurangnya ruang terbuka hijau dan lahan yang makin menyempit. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini membuat kebijakan tentang Tata Ruang Kota Semarang sebagai salah satu kebijakan yang dilakukan agar laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan Infrastruktur berjalan dengan relevan. Perlu dilakukan pengendalian perizinan pembangunan yang ketat terutama pada daerah-daerah pinggiran Kota (Arsandi et al., 2017)

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Rosa Pasrah dalam *Efektivitas program keluarga berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru* mengkaji tentang program Keluarga Berencana sebagai salah satu kebijakan yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Penelitian ini menemukan bahwa program Keluarga Berencana (KB) yang dilakukan di Kota Pekanbaru belum menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan yang disebabkan oleh angka kelahiran bayi dan Ibu hamil semakin meningkat. Tahun 2012 angka pertumbuhan penduduk sebesar 2,83% dibandingkan dengan Tahun 2011. Ketidakberhasilan program keluarga berencana ini juga disebabkan oleh beberapa faktor antaranya, rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh instansi terkait program keluarga berencana ini (Pasrah et al., 2014)

Dalam penelitian yang serupa oleh Dianatun dalam *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2000-2015* mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk yang dapat membuat angka laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah faktor kelahiran yang tidak dapat dikendalikan melalui berbagai program. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang ini disimpulkan bahwa faktor terbesar pertumbuhan penduduk yang pesat adalah angka kelahiran yang terlalu tinggi (Almaulida et al., 2018)

Menekan laju pertumbuhan penduduk adalah salah satu permasalahan yang harus segera diselesaikan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri dalam *EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA MAKASSAR* mengkaji tentang Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Penelitian ini menemukan bahwa program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar belum berjalan efektif disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan masih banyak masyarakat yang tidak setuju dengan program ini, sehingga dalam perjalanannya masih banyak hambatan dan perlunya evaluasi dalam program keluarga berencana ini. Dalam merancang sebuah program, pemerintah harusnya lebih menyiapkan secara matang agar sebuah program dapat berjalan baik dan efektif (Fitri, 2018)

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini ialah yang dilakukan oleh Made Suriawan dalam *PERANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK UNTUK MENGURANGI TINGKAT KRIMINALITAS DI KABUPATEN BULELENG* mengkaji tentang tunngkat kriminalitas yang dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh pertumbuhan penduduk yang pesat berbanding lurus dengan naiknya tingkat kriminalitas di Kabupaten Buleleng, sehingga pemerintah di dorong untuk melakukan sebuah kebijakan yang relevan ntuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebaiknya masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menyukseskan program Keluarga Berencana (Widya, 2019)

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Pradana tentang *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk* mengkaji tentang bagaimana keberhasilan program Keluarga Berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Dalam penelitian ini Pradana menyimpulkan bahwa program ini belum berjalan secara maksimal disebabkan karena masih banyak temuan tentang pernikahan dini yang masih berumur 18-19 tahun, sehingga program ini dapat dikatakan belum terlalu efektif. Ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari instansi terkait untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga mengakibatkan pengetahuan masyarakat akan keluarga berencana masih sangat kurang (Pradana, 2019)

Penelitian lainnya yang membahas tentang hal serupa yang dilakukan oleh Rasidah dkk tentang *EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA IMPLANT DALAM MENEKAN TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KECAMATAN BATU LAPPA KABUPATEN PINRANG* mengkaji tentang bagaimana program KB implant dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa program ini bisa dikatakan efektif, karena sasaran program jelas dan tepat, yang mana program KB implant ini ditujukan bagi pasangan yang memiliki tingkat kesuburan diatas rata-rata penduduk lainnya. Disarankan pada Pemerintah dan Instansi terkait harus lebih tegas dan lebih berupaya lagi untuk terus meningkatkan pelayanan Program KB dan terus mensosialisasikan Program KB, untuk masyarakat Pasangan Usia Subur diharapkan kesadarannya ikut dalam menyukseskan program pemerintah dalam mengatasi pertumbuhan penduduk di Kecamatan Batu Lappa Kabupaten Pinrang (Sari et al., 2020).

Dalam penelitian lain yang membahas tentang analisis pertumbuhan penduduk yang dilakukan di Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Alfrida menemukan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia akan sejalan dengan keluarga yang tidak akan memiliki banyak anak dan ini terbukti telah dilakukan oleh negara-negara maju. Penelitian yang berjudul *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DIPROVINSI BENGKULU* ini membahas tentang bagaimana cara Pemerintah Provinsi Bengkulu membuat kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang salah satunya dengan program Keluarga Berencana (KB). Dalam membuat suatu kebijakan sebaiknya pemerintah mempertimbangkan banyak aspek agar program tersebut berjalan sesuai dengan rencana (Rante et al., 2018)

Penelitian lain yang serupa dengan penelitian ini membahas tentang pengaruh tingkat laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Kota Probolinggo ini menemukan bahwa tingkat pertumbuhan yang pesat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Penelitian yang berjudul *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)* membahas tentang bagaimana korelasi antara pertumbuhan penduduk dan tingkat kemiskinan sehingga menyarankan berbagai macam program untuk mengendalikan permasalahan tersebut. Kurangnya keterampilan yang diberikan dan bantuan yang diterima tidak utuh, selain itu bantuan yang diberikan diadakan melalui pihak ketiga (Wulan et al., 2019).

Penduduk merupakan bagian dalam pembangunan di negara. Komponen terpenting dalam pembangunan tergantung dari kualitas penduduk. Penelitian serupa yang membahas tentang implementasi kebijakan menekan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan di Kota Sidoarjo menemukan bahwa Pemerintah Kota Sidoarjo membuat kebijakan ini dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan membatasi angka kelahiran yang cepat. Penelitian yang berjudul *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN SIDOARJO* membahas tentang pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan masalah sosial yang lain, sehingga banyak permasalahan baru yang sulit untuk diselesaikan. Untuk mencapai program keluarga berencana dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat terealisasi (Diro et al., 2016)

Table 1. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Kekurangan	Kelebihan
----	------------------	------------	-----------

1.	<i>Hubungan antara Fertilitas, Moralitas, Dan Migrasi Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk</i>	Kurangnya data dan survey terkait laju pertumbuhan penduduk	Dapat menghitung laju pertumbuhan penduduk setiap tahun dengan menghitung angka kematian dan angka kelahiran
2.	<i>Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram</i>	Efektivitas Program KB tidak berjalan dengan baik sehingga peneliti kesulitan mendapatkan data yang sesuai	Menemukan beberapa alasan masyarakat tidak mengikuti program KB sehingga dapat memberikan saran kebijakan kepada pemerintah Kota Mataram
3.	<i>Penerapan metode eksponensial pada proyeksi laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara</i>	Kurangnya sample penelitian yang membuat kurang	Penelitian ini menggunakan metode ekspoponensial

		kuatnya pembahasan bagaimana cara menekan laju pertumbuhan penduduk	dalam menghitung laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat menghitung angka kelahiran dan cara menemukannya
4.	<i>Analisis Dampak Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Aspek Kependudukan Berwawasan Gender Pada Urban Area Di Kota Serang</i>	Penelitian ini terlalu terfokus terhadap satu gender sehingga tidak mendapatkan data yang sesuai	Menggunakan analisis gender sehingga dapat menemukan salah satu akibat pertumbuhan penduduk yang pesat yaitu pencemaran lingkungan
5.	<i>Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Infrastruktur Kota Semarang</i>	Terlalu terfokus terhadap infrastruktur sehingga sebab pertumbuhan penduduk tidak banyak dibahas	Penelitian ini menemukan bahwa semakin padatnya penduduk membuat ruang terbuka

			hijau berkurang dan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur
6.	<i>Efektivitas program keluarga berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru</i>	Masih kurang tepatnya kebijakan yang sesuai dari pemerintah sehingga penelitian ini tidak mendapatkan hasil yang sesuai terhadap laju pertumbuhan penduduk	Penelitian ini menemukan tentang masyarakat yang mengikuti program keluarga berencana sehingga dapat membantu menekan laju pertumbuhan penduduk
7.	<i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Tahun 2000-2015</i>	Data penelitian yang terlalu banyak karena membahas faktor pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2015 sehingga dalam hal	Pembahasan penelitian ini sudah mengarah terhadap penekanan laju pertumbuhan penduduk dengan menggunakan

		pembahasan kurang rinci	survei secara langsung
8.	<i>EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA MAKASSAR</i>	Kekurangan penelitian ini adalah peneliti terlalu membahas secara general sehingga dalam pembahasannya tidak memuat faktor utama program Keluarga Berencana	Penelitian ini menggunakan metode eksperimen sehingga dapat menemukan penyebab laju pertumbuhan penduduk yang pesat
9.	<i>PERANAN BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK UNTUK MENGURANGI TINGKAT KRIMINALITAS DI KABUPATEN BULELENG</i>	Kurangnya Narasumber dan responden membuat penelitian ini tidak mendapatkan data yang mengarah terhadap tingkat kriminalitas	Penelitian ini menggunakan aspek perempuan yang mana belum banyak penelitian yang menggunakan aspek ini
10.	<i>Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan</i>	Masih banyaknya pernikahan dini yang	Penelitian ini menemukan beberapa faktor penting

	<i>Penduduk</i>	menyebabkan penelitian ini tidak dapat memberikan hasil yang sesuai terhadap cara menekan laju pertumbuhan penduduk	yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk naik secara signifikan
11.	<i>EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA IMPLANT DALAM MENEKAN TINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KECAMATAN BATU LAPPA KABUPATEN PINRANG</i>	Masih kurangnya referensi terhadap Program KB Implant sehingga bahasa dan tata penulisan kurang dimengerti	Peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap program KB Implant dan memberikan data yang spesifik

12.	<p><i>Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh</i></p>	<p>Kebijakan baru yang dilakukan pemerintah Aceh membuat kurang efektifnya program berjalan sehingga peneliti kurang mendapatkan hasil yang sesuai dengan konteks pertumbuhan penduduk</p>	<p>Menemukan kebijakan baru yang belum banyak dilakukan di Indonesia terkhususnya terhadap laju pertumbuhan penduduk</p>
13.	<p><i>ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI PROVINSI BENGKULU</i></p>	<p>Kebijakan yang belum sesuai dengan hal yang terjadi dilapangan menjadikan kebijakan ini perlu ditinjau kembali</p>	<p>Pemerintah akhirnya membuat suatu terobosan baru untuk membuat kebijakan tentang laju pertumbuhan penduduk</p>
14.	<p><i>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK USAHA</i></p>	<p>Kurang tepat sasaran nya bantuan ekonomi terhadap</p>	<p>Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya pendataan</p>

	<i>BERSAMA</i>	keluarga yang banyak anggota membuat kebijakan ini masih jauh dari kata berhasil	terhadap keluarga yang masih memiliki banyak anak.
15.	<i>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN SIDOARJO</i>	Kesertaan KB Pria masih rendah terutama Medis Operasi Pria (MOP) karena masih kuatnya persepsi masyarakat tentang pelaksanaan program KB adalah urusan perempuan	Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui pembinaan kesehatan reproduksi remaja.

Dari beberapa hasil uraian tinjauan pustaka diatas, disini penulis meneliti terkait tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Apa saja kebijakan yang sudah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, penelitian ini diangkat karena keresahan penulis yang mana Provinsinya sendiri yaitu NTB hingga saat ini masih belum membuat sebuah kebijakan yangt relevan dengan penekanan laju pertumbuhan penduduk. Seperti yang sudah diuraikan pada Latar Belakang,

penulis ingin meneliti tentang kenapa Pemerintah Provinsi NTB tidak memanfaatkan sumber daya alam Pulau Sumbawa yang begitu luas dengan cara mengefektifkan laju persebaran penduduk, sehingga penduduk di NTB tidak hanya padat di pulau Lombok, seperti yang diketahui bahwa $\frac{2}{3}$ penduduk NTB berada di pulau Lombok. Tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, angka pengangguran yang semakin hari semakin meningkat, lapangan pekerjaan yang semakin menyempit membuat pertumbuhan ekonomi semakin menurun dan tingkat kemiskinan masyarakat perkotaan dan pedesaan semakin tinggi. Pulau Sumbawa yang memiliki luas wilayah 3 kali lebih besar dari pulau Lombok diharapkan menjadi tempat tinggal baru bagi penduduk Provinsi NTB sehingga beberapa permasalahan sosial diatas dapat diselesaikan. Dengan kekayaan Sumber Daya Alam Pulau Sumbawa yang begitu melimpah dapat dijadikan sebagai pembukaan lapangan pekerjaan baru dan tempat tinggal baru bagi masyarakat NTB, disisi lain Pulau Lombok yang sudah terlalu padat menimbulkan permasalahan sosial baru yang menyebabkan tingkat layak hidup jauh dari kata cukup. Sehingga harapan penulis kedepannya, penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi pemerintah NTB dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan penekanan laju pertumbuhan penduduk.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Komunikasi

Dalam buku karangannya yang berjudul “Dinamika Komunikasi” , Onong Uchjana Effendy berpendapat bahwa pengertian komunikasi harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara paradigmatis. Pengertian komunikasi secara umum itupun harus juga dilihat dari dua segi, yaitu pengertian komunikasi secara etimologis dan pengertian komunikasi secara terminologis. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin *communicatio* yang bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Kata sama yang dimaksudkan adalah sama makna. Jadi dalam pengertian ini, komunikasi berlangsung manakala orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kesamaan makna mengenai suatu hal yang tengah dikomunikasikannya itu. Dengan kata lain, jika orang-orang yang terlibat di dalamnya saling memahami apa yang dikomunikasikannya itu, maka hubungan antara mereka bersifat komunikatif.

Sebaliknya, jika ada pihak yang tidak mengerti tentang suatu hal yang sedang dikomunikasikan, berarti komunikasi tidak berjalan, dan hubungan antara orang-orang tersebut tidak komunikatif. Pengertian secara terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Pengertian ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang atau manusia, sehingga komunikasi seperti ini disebut sebagai *Human Communication* (komunikasi manusia). Sedangkan pengertian secara paradigmatis, meskipun banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, namun dari semua definisi itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik langsung (komunikasi tatap muka) maupun tidak langsung (komunikasi melalui media). Dari definisi tersebut tersimpul bahwa tujuan komunikasi dalam pengertian paradigmatic adalah untuk mendapatkan efek tertentu pada komunikan. Menurut Onong Uchjana Effendy, efek yang ditimbulkan akibat terpaan pesan dapat diklasifikasikan menurut kadarnya, yakni : efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif/behavioral. Efek kognitif adalah efek yang timbul pada komunikan yang menyebabkan dia menjadi tahu mengenai suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Dalam hal ini, komunikator hanya ingin mengubah pikiran komunikan. Efek afektif kadarnya lebih tinggi dari efek kognitif. Disini tujuan komunikator tidak hanya untuk sekedar memberi tahu mengenai suatu hal kepada komunikan, tetapi berusaha agar komunikan tergerak hatinya dengan munculnya sikap atau perasaan tertentu, seperti perasaan iba, sedih, terharu, gembira, marah, dan sebagainya. Sedangkan efek konasi atau efek behavioral adalah efek yang kadarnya paling tinggi, yaitu berubahnya perilaku atau sikap komunikan setelah mendapat terpaan pesan dari komunikator.

Pengertian komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin communis atau dalam bahasa inggrisnya common berarti sama. Apabila kita berkomunikasi berarti kita dalam keadaan berusaha untuk menimbulkan suatu persamaan dalam hal sikap dengan seseorang. Jadi pengertian komunikasi secara harfiah adalah proses menghubungi atau mengadakan perhubungan.

Menurut (Shahreza, 2018) komunikasi secara umum merupakan suatu bentuk ineraksi antar makhluk hidup maupun organisme yang berarti komunikasi bukan saja dilakukan oleh manusia tapi setiap organisme yang ada di alam semesta ini juga terkoneksi dengan suatu

komunikasi. Ada saling ketergantungan antara satu sama lain berdasarkan fungsinya dan karakteristik khas masing-masing variabel dalam suatu proses yang dinamis terkait dengan pengiriman simbol-simbol yang memiliki arti ada makna tertentu dalam suatu sistem kehidupan.

Sedangkan menurut (Effendy OU, 2018) Pengertian secara terminologis, komunikasi adalah prosespenyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Pengertian ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa komunikasimelibatkan sejumlah orang atau manusia,sehingga komunikasi seperti ini disebutsebagai Human Communication (komunikasi manusia).

Bermkomunikasi merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Dengan berkomunikasi manusia akan dapat berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga kehidupan manusia akan bermakna. Disisi lain ada sejumlah kebutuhan dalam diri manusia itu hanya dapat dipenuhi melalau komunikasi dengan sesama. Makin banyak manusia itu melakukan aktivitas komunikasi antara satu dengan yang lainnya, akan semakin banyak informasi yang didapatnya dan semakin besar peluang keberhasilan seseorang itu dalam kehidupannya.

Dalam komunikasi diperlukan sedikitnya tiga unsur yaitu sumber (source), berita atau pesan (message), dan sasaran (destination). Sumber dapat berupa individu atau organisasi komunikasi. Berita atau pesan dapat berupa tulisan, gelombang suara atau komunikasi arus listrik, lambaian tangan, bendera berkibar, atau benda lain yangmempunyai arti. Sasaran dapat berupa seorang pendengar, penonton, pembaca,anggota dari kelompok diskusi, mahasiswa, dan lain-lain.

1.6.2 Sumber Daya

Tobari dalam Jurnal univpgri_palembang (Perencanaan SDM) pengertian Sumber Daya Manusia dapat dibedakan menjadi makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah

tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Sedangkan SDM dalam arti mikro adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dll. Menurut (Christalisana, 2018) SDM adalah semua orang yang terlibat dan bekerja untuk mencapai suatu tujuan organisasi ataupun perusahaan. SDM adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja dan tenaga kerja.

Sedangkan (Michael, 2017) mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal berkaitan dengan pembinaan, penggunaan dan perlindungan sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah mengelola unsur-unsur manusia dengan segala potensi yang dimiliki sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang dapat mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia sebagai pendekatan strategis terhadap keterampilan, motivasi pengembangan dan manajemen pengorganisasian sumber daya manusia.

Sumber daya keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, Menurut (Widowati & Santoso, 2018) dalam teori George C. Edwar dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak komponen dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf

dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakn atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

2. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apabila orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata public tidak terlegimitasi sehingga dapat menggalkan proses implementasi kebijakan.
4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidaka kan berhasil.

1.6.3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut (Laloma, 2019) dalam teori Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam (Laloma, 2019) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin

berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam (Setiawan & Tangerang, 2020) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

1.6.4. Struktur Birokrasi

Menurut (Faeruz, 2020) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan

sumber daya- sumber daya menjadi menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Standar Operating Prosedure (SOP), suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan) Melaksanakan fragmentasi, upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Menurut (Palar, 2017) dalam teori Robbins struktur birokrasi memiliki tiga komponen atau dimensi, yaitu :

1. Kompleksitas, ialah tingkat diferensiasi atau pembagian kerja yang ada dalam organisasi baik secara hirarki maupun unit-unit organisasi yang tersebar secara geografis. Bahwa kompleksitas adalah sejumlah perbedaan pekerjaan atau sejumlah aktivitas fungsi yang dilaksanakan oleh organisasi. Semakin kompleks organisasi semakin sulit mengelola pekerjaan manajerial karena terdapat ketidaksamaan baik dalam unit/kelompok tugas maupun pekerjaan individu.
2. Formalisasi, ialah penggunaan peraturan dan prosedur yang tertulis untuk menstandarisasi beberapa operasi organisasi. Selain itu, formalisasi mengacu pada perluasan ekspektasi kerja, aturan-aturan, dan kebijakan-kebijakan perilaku yang diharapkan dan dinyatakan dalam bentuk tertulis.
3. Sentralisasi, ialah letak dari pusat pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sentralisasi terkait dengan partisipasi dan otonomi, yang dalam praktek sulit untuk dikenali karena keputusan dapat dibuat oleh setiap individu dalam organisasi

1.7 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah batasan-batasan yang menjadi pedoman untuk memudahkan pencarian data dalam penelitian. Untuk memahami penafsiran dari teori-teori diatas, maka ditentukan beberapa definis konseptual, yaitu :

1. Komunikasi

Suatu interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam menjelaskan keadaan dan juga menjelaskan informasi.

2. Sumber Daya

Suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya terdiri dari fisik dan non fisik.

3. Disposisi

Suatu bentuk keseriusan atau kemauan dari impementator yang akan menjalankan suatu program atau kebijakan yang sudah dibuat.

4. Struktur Birokrasi

Suatu tingkatan yang ada dalam sebuah instansi atau organisasi dan memiliki fungsi masing-masing agar mencapai tujuan yang diinginkan.

1.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional yakni indikator-indikator dalam mengukur variable penelitian yang diturunkan dari kerangka teori. Menurut Sudaryono, definisi operasional dapat didefinisikan sebagai petunjuk dalam mempermudah peneliti menentukan sebuah variable dan indicator yang akan diuji secara empiris (Dr. Sri Hernawati, drg., 2017). Menurut George C Edward III dalam (Elsa Lettiyani, Isabella Isabella, 2017) terdapat empat indikator penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan public yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Table 2. Variabel Definisi Operasional

Variable	Indikator
Komunikasi	-Pemerintah NTB membuat kebijakan

	<p>program kampung keluarga berencana</p> <p>-Pemerintah NTB memberikan sosialisai tentang Program Kampung Keluarga Berencana kepada kampung yang terlibat dalam program tersebut</p>
Sumber Daya	-Pemerintah NTB telah melaksanakan program kampung keluarga berencana dan melibatkan desa atau kampung yang sesuai dengan syarat dan kriteria
Disposisi	-Sebagai komitmen dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi NTB, Pemerintah NTB telah membuat lebih dari 200 Desa/Kampung Keluarga Berencana di NTB
Struktur Birokrasi	-Pemerintah NTB menjalankan Program Kampung Keluarga Berencana berdasarkan SOP yang tercantum dalam guideline program/kebijakan

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari pelaku yang akan diamati (Creswell, 2016). Metode kualitatif memberikan ruang kepada peneliti untuk menginvestigasi kasus secara mendalam dan lebih detail. Kasus yang diteliti biasanya peristiwa, aktivitas, program, atau proses yang melibatkan individu atau kelompok. Unit analisa objek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam dalam peneliyian ini penulis ingin

melakukan penelitian di Provinsi NTB yang mana lebih khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Pusat Statistik Provinsi NTB.

1.9.2 Jenis data

Data Primer

Menurut Sugiyono mengatakan bahwa data primer diperoleh dari sumber asli atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini dan mampu memberikan berbagai informasi. Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan wawancara melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada sumber yang mengetahui pokok permasalahan mengenai. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

Table 3. Data Primer

Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB (Panca Kusuma Waldi)	Wawancara
2. Kepala BPS NTB (Suntono)	
3. Kepala Bidang Sosbud DPMPD NTB (Suwardi)	
4. Pengurus Kampung Keluarga Berencana Tumbuh Mulia (Amaq Hijriatun)	

Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang dikumpulkan sebagai penunjang data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara studi keperpustakaan dari berbagai media seperti buku, dokumen, artikel, jurnal, undang-undang, maupun peraturan-peraturan yang masih relevan dengan penelitian (Arikunto, 2010). Pada penelitian ini peneliti akan memperoleh data sekunder melalui :

Table 4. Data Sekunder

No	Sumber Data Sekunder
1	Data terdahulu yang tersedia di BPS NTB
2	Buku tentang kependudukan
3	Jurnal tentang kependudukan

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian di Lapangan, maka digunakan teknik antara lain :

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan relevan mengenai penelitian ini, informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang mengetahui dan dianggap paling aktif dalam

upaya Pemberdayaan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Table 5. Wawancara

No	Narasumber	Jumlah
1	Kepala Bidang Dukcapil NTB	1
2	Kepala BPS NTB	1
3	Kepala Bidang Sosial dan Budaya DPPMPD	1
4	Pengurus Kampung Keluarga Berencana Tumbuh Mulia	1

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumentasi, foto, buku, maupun karya yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini peneliti akan memperoleh data dokumentasi mengenai Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram sebagai Ibu Kota wilayah NTB

1.9.4 Teknik Analisa Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, desain studi kasus dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi dokumentasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif studi kasus. Menurut Patton, dalam (Sugiyono, 2015) analisis data yaitu proses menyusun dan mengatur secara sistematis data yang di dapat melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam uni-unit, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Pemerintah Provinsi NTB terkhusus Badan Pusat Statistik (BPS) NTB dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Povinsi NTB.